



## Implementasi Kurikulum K13 Dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan

Desy Tambaritji<sup>1</sup>, Jhon Lagun Siang<sup>2</sup>, Ellen S. Kambey<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado

### Abstract

*Received: 2 September 2024*  
*Revised: 8 September 2024*  
*Accepted: 28 September 2024*

The aimed of this research was to analyze: 1). The implementation of the K13 Curriculum in school-based management at Alfa Omega Tumpaan Christian High School, 2). The supporting factors for the implementation of the K13 curriculum in school-based management at Alfa Omega Tumpaan Christian High School, 3). The inhibiting factors for the Implementation of the K13 Curriculum in School-Based Management Schools at Alfa Omega Tumpaan Christian High School, 4). The efforts have been made to overcome inhibiting factors in increasing the success of the implementation of the K 13 curriculum in school-based management at Alfa Omega Tumpaan Christian High School. The method used in this research was qualitative descriptive. The data was collected by using observation, interview and documentation study. The results of the research that the implementation of the K13 curriculum in school was not optimal, because the government and the foundation do not pay enough attention to the school, especially in sending teachers, facilities and infrastructure, and improving the quality of teachers through education and training, and seminar so that the interest of the society toward the school was low

**Keywords:** K13 Curriculum, School-based management.

(\*) Corresponding Author: [desitambaritji@gmail.com](mailto:desitambaritji@gmail.com)

**How to Cite:** Tambaritji, D., Siang, J., & Kambey, E. (2024). Implementasi Kurikulum K13 Dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 36-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13933100>

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat intelegensi masyarakat dalam berbagai macam aspek. Melalui pendidikan manusia yang adalah makhluk sosial dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat bersaing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita – cita yang diinginkan.

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam dunia pendidikan, oleh sebab itu harus dikembangkan. Sumber daya manusia merupakan suatu tuntutan, baik tuntutan secara formal, dan teknis operasional maupun tuntutan penguasaan teoretis dan praktis empiris. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah sebabnya pemerintah sebagai salah satu komponen yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui pelaksanaan berbagai pendidikan dan pelatihan, untuk peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah (Depdiknas, 2007:1).

Namun demikian indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hai ini terbukti dengan adanya sebagian sekolah, terutama di kota-kota yang menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembarakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan, terutama sekolah-sekolah



dipedesaan dan di wilayah terpencil. Hal ini terjadi karena pendidikan menerapkan sistem sentralisasi yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut sekolah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Dengan menganut sistem sentralisasi tersebut pendidikan di Indonesia dinilai sangat kaku dan sentralistik. Inilah yang menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sri Minarti (2011:48) mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kekurangberhasilan upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *inputoriented* dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan *macrooriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.

Sistem sentralistik dirasakan kurang maksimal dalam mengakomodir konflik dan permasalahan lokal sehingga menciptakan rasa ketergantungan pihak lokal dengan pusat sehingga rasa kemandirian berkurang bahkan mematikan daya kreasi, inovasi dan kebebasan pendidikan tingkat lokal. Hal ini menuntut segenap lembaga pendidikan yang ada di negeri ini untuk bangkit dan berjuang dalam usaha memperbaiki pendidikan agar menjadi lembaga yang berkualitas dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian diperlukan adanya kesadaran untuk menampilkan lembaga pendidikan yang berkualitas dalam usaha memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru yang timbul di setiap zaman.

Dari beberapa hal tersebut diatas maka dapat kita ketahui dari situs – situs internet yang menyebutkan polling bahwa sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem yang terburuk di kawasan Asia. Hal tersebut dikarenakan karena bangsa kita sedang berada dalam masa transisi yakni berada dalam masa reformasi yang ada di era ini membawa berbagai macam dampak. Salah satu permasalahan utama rendahnya mutu pendidikan disebabkan kurang terampilnya sekolah dalam mengelola manajemen sekolahnya, baik itu mengelola tenaga SDM nya, kurikulum, sarana dan prasarana maupun mengelola pembiayaan pendidikan.

Tanggung jawab sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari memperbaiki system manajemen sekolah. Salah satu cara untuk memperbaiki buruknya system manajemen sekolah yaitu dengan mengimplementasikan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Semenjak diberlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, Depdiknas merubah orientasi manajemen sekolah yang dulunya berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS) (Usman, 2006:572). Secara umum, manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua, *Stakeholder*, ilmuwan).

Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau *stakeholder* yang ada. (Depdiknas, 2007:12). Fleksibilitas dan keluwesan sekolah akan lebih lincah dalam mengelola pemanfaatan sumber daya sekolah secara optimal dengan partisipasi dan pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah dan rasa memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Rasa memiliki yang tinggi akan mengarahkan pada rasa tanggung jawab yang meningkat, rasa tanggung jawab yang meningkat akan meningkatkan dedikasi anggota sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. Hal inilah yang menjadi esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam Pendidikan (Rohiat, 2012:48).

Asmani (2012:48) berpendapat bahwa peran warga masyarakat telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan komite sekolah. Dalam pelaksanaannya komite

sekolah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Dalam mewujudkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga muncul kebijakan operasional pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaannya komite sekolah dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan program pendidikan serta rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah. Komite sekolah juga dalam hal ini diharapkan berperan sebagai pendukung, konsultan, mediator, dan pengendali pendidikan yang ada di sekolah.

Tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui keterlibatan orang tua, pengelolaan sekolah yang baik, peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan guru, serta adanya pemberian penghargaan hadiah dan sanksi sebagai kontrol yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah untuk menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang mampu peduli terhadap pendidikan yang diselenggarakan.

Keberhasilan dalam manajemen berbasis sekolah dapat diraih karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Oemar Hamalik, 2003:18). Isi kurikulum merupakan susunan, bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan dan karakter bangsa.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 lebih fokus dan berangkat dari karakter serta kompetensi yang akan dibentuk, baru memikirkan untuk mengembangkan tujuan yang akan dicapai. Kurikulum 2013 berbasis pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **1. Manajemen Berbasis Sekolah**

Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari "*School based management*". Manajemen berbasis sekolah (MBS) menurut Ibtisam (2002:17) dalam bahasa Inggris disebut "*School Based Management*" merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Menengah.

Dalam implementasi konsep MBS, Kementerian Agama RI (2002:2) mengembangkan dalam bingkai "Madrasah Mandiri". Mandiri dalam mengelola program dan sumber daya seperti: pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Dirjen Dikdasmen, bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relative tinggi, dalam rangka Kebijakan Pendidikan Nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurut Mulyasa (2011:24) MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru, staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah serta pelibatan komite dan adanya respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat. MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil desentralisasi dalam bidang, dan . sebagai wujud reformasi pendidikan. MBS bertumpu pada sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta mengelola sumber daya yang ada, berinovasi untuk ketercapaian tujuan sekolah dengan rendahnya kontrol pemerintah pusat dan meningkatnya otonomi sekolah. MBS memiliki karakter yang perlu dipahami sekolah yang akan menerapkannya. Menurut Bellen, dkk.(1999:11-12) manajemen Berbasis Sekolah dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu penyelenggaraan sekolah, kinerja kepala sekolah, dan peran serta masyarakat. Karakteristik MBS bisa diketahui juga antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi.

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.

Berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek tujuan MBS yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Keberhasilan sekolah harus berada dalam konsep yang lebih luas, diantaranya: pemahaman dan penghargaan pada multi budaya, menurunnya tingkat putus sekolah (*drop out*), pelayanan kepada masyarakat, terbukanya berbagai pilihan (mata pelajaran), partisipasi di dalam kelas matematika dan IPA yang lebih tinggi, pilihan dan kesuksesan pasca pendidikan menengah, dimilikinya konsep pribadi siswa dan kreativitas serta keindahan dalam seni.

Namun, keberhasilan pencapaiannya tergantung pada kualitas program pendidikan dan pelayanan yang diberikan. Ukuran keberhasilan implementasi MBS di

Indonesia dapat dinilai dari beberapa kriteria : 1). MBS dianggap berhasil apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat, 2) MBS dianggap berhasil apabila kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik, 3) tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar, 4) karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik, 5) terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga, 6) semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah baik yang menyangkut keputusan intruksional maupun organisasional, 7) salah satu indikator penting lain kesuksesan MBS adalah semakin baiknya iklim dan budaya kerja sekolah, 8) kesejahteraan guru dan staf seolah membaik antara lain karena sumbangan pemikiran, tenaga dan dukungan dana dari masyarakat luas, 9) apabila semua kemajuan pendidikan di atas telah tercapai maka dampak selanjutnya adalah akan terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

## 2. Kurikulum K13

Kurikulum berasal dari bahasa latin *Curriculae*, yang berarti Perencanaan Program Pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan Ijasah. Kurikulum juga bisa di sebut jantungnya pendidikan yaitu mulai dan tamat dalam pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan terus maju sehingga terus terjadi perubahan Kurikulum K 13 atau juga kurikulum tahun 2013 adalah pelajaran tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang akan diketahui, dan di lanjutkan dengan mencari informasi sendiri. Penekanan kurikulum K13 adalah peningkatan dan pengulangan kompetensi, juga menjaga keseimbangan kemampuan sikap ketrampilan dan pengetahuan siswa. Dalam mengimplemetasikan kurikulum K13 maka dasar hukum yang di pakai adalah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Ciri-ciri Kurikulum K13 adalah a) Belajar tuntas, b) Autentik, c) berkesinambungan, dan d) Menggunakan penilaian yang bervariasi.

Implementasi Kurikulum K13 adalah Usaha bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sampai di desa. Seluruhnya bergantung pada kreatifitas kecakapan dan kesungguhan ketekunan guru dengan selalu mampu mengaktifkan siswa baik dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi.

Beberapa hal yang menjadi tugas pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum K13, yaitu: a) Pemerintah pertama mampu mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum, b) Pemerintah berhak melaksanakan evaluasi dan kurikulum, c) Pemerintah berhak melakukan supervisi dan evaluasi kurikulum, d) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan kurikulum, dan dalam bentuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan memberikan sarana dan prasarana baik gedung dan buku pelajaran pendampingan dalam bentuk evaluasi bagaimana menanggulangi berbagai kesulitan yang di jumpai. Kurikulum K13 (mulyasa, 2013:65) bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman , produktif, kreatif, inovatif, afektif serta berkontribusi pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara dan peradapan dunia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan, sejak bulan Februari sampai Juni 2024. Subjek dan informan dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua/wali siswa, komite sekolah,

dan masyarakat sekitar sekolah. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Prosedur Analisis Data dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data, b) reduksi data, c) penyajian data, d) kesimpulan dan Verifikasi, sedangkan langkah-langkah untuk pemeriksaan keabsahan data adalah 1) Pemeriksaan Keabsahan Data, 2) Kredibilitas, 3) Transferabilitas, 4) Dependabilitas, 5) Konfirmabilitas.

### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka Implementasi Kurikulum K13 pada SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan adalah :

1. Implementasi Kurikulum K13 pada SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan, berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan Kurikulum K13 sejak tahun 2016 untuk kelas XI dan XII, sedangkan kelas X menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum K13 telah dilaksanakan dengan pembebanan belajar pada siswa atau *student center*, guru sebagai motivator dan fasilitator.
2. Faktor pendukung penerapan Kurikulum K13, adalah kepala sekolah dan guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, dan merancang pelaksanaan pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan, upaya tersedianya sarana dan prasarana sekolah meski belum memadai, serta adanya kerjasama dan bantuan /dukungan dari orang tua/ komite sekolah dan stakeholder.
3. Beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum K13 yaitu kurangnya jumlah guru, fasilitas sarana dan prasarana penunjang kurikulum K13 belum memadai, serta jumlah siswa kurang. Faktor penghambat lainnya adalah pembayaran honor guru tidak tetap kurang lancar, yayasan kurang peduli, motivasi belajar siswa yang masih rendah disebabkan sebagian berasal dari keluarga broken home, sehingga sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian dari guru.
4. Guru yang adalah salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan penerapan kurikulum K13 hendaknya diikutsertakan dalam pelatihan kurikulum K13, seminar-seminar, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta melakukan pengadaan buku pelajaran siswa dipergustakaan secara berkala.

### **PEMBAHASAN**

Peningkatan mutu sekolah tidak terlepas dari memperbaiki kurikulum, meningkatkan kinerja semua SDM sekolah terutama guru dan kepala sekolah, menambah buku pelajaran, dan menyediakan sarana prasarana sekolah. Untuk meningkatkan mutu sekolah diperlukan guru kompeten atau memiliki kemampuan yang optimal, kesiapan sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar dengan menyediakan pendidikan yang ada di wilayahnya disertai penataan manajemen. Penyelenggaraan otonomi sekolah sebagai langkah esensial dari otonomi daerah; dan telah diterapkan suatu terobosan kebijaksanaan untuk otonomi pendidikan yang disebut manajemen berbasis sekolah (*school based management*). Dengan otonomi sekolah, dapat lebih dioptimalkan peran sekolah dan menghargai kebutuhan nyata di setiap sekolah. Pemerintah sekarang telah berkomitmen, bahwa pendidikan berkualitas hanya akan nyata terwujud, bila otonomi daerah berujung pada otonomi sekolah yang berbasis manajemen (*School Based Management*).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh

komponen sekolah serta pelibatan komite dan adanya respon pemerintah terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, perbaikan kurikulum, partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

Kurikulum K13 dalam manajemen berbasis sekolah pada SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan telah diterapkan. Kegiatan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum 2013 khususnya untuk kelas XI dan Kelas XII sedangkan kelas X telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Dalam penerapan kurikulum K13 proses pembelajaran berfokus pada siswa atau student center learning. Tujuan akhir proses pembelajaran bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap tetapi lebih diprioritaskan pada pembentukan karakter peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator, dimana siswa belajar mandiri, berupaya menemukan sendiri solusi terhadap masalah pembelajaran namun tidak lepas dalam bimbingan dan tuntunan guru. Salah satu tujuan dari penerapan kurikulum K13 adalah meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh sebab itu guru hendaknya memiliki kompetensi yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Ketersediaan perangkat guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, penguasaan materi ajar, kesesuaian metode yang digunakan, penggunaan media pembelajaran, dan alat evaluasi sangat penting bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah berkaitan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan hubungan antar manusia. Maka syarat yang harus dipenuhi seseorang yang dipilih atau diangkat menjadi kepala sekolah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan kemampuan dalam membina hubungan baik dengan semua personel sekolah (Nurkolis (2004). Berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan meliputi proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi/lembaga pendidikan terutama untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan membimbing, menggerakkan serta mendorong dan mengarahkan orang-orang yang ada dalam lembaga pendidikan, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer dalam menerapkan kurikulum K13 di SMA Kristen Alfa dan Omega Tumpaan tidak hanya memfokuskan pada pengelolaan peserta didik saja, namun kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah seperti tenaga pendidik, peserta didik, staff dan komite sekolah juga dikelola dengan sebaik-baiknya bahkan pendataan, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana sekolah pun harus diperhatikan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan manajer kepala sekolah SMA Kristen alfa dan Omega Tumpaan memperhatikan kebutuhan siswa dimana sekolah memfasilitasi siswa untuk belajar seperti tersedianya sarana prasarana pembelajaran meskipun belum cukup memadai. Untuk meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah diharapkan mengirim guru untuk mengikuti pelatihan Kurikulum K13, pembuatan media pembelajaran, seminar pembelajaran, workshop, bahkan membuat karya ilmiah. Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam penerapan kurikulum K13, kepala sekolah melakukan supervisi pada guru baik dalam proses pembelajaran maupun kelengkapan administrasi dua kali dalam satu semester.

Pemerintah yang adalah pengayom pendidikan, yang tugasnya adalah mempersiapkan guru bagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan kepala sekolah serta memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk semua sekolah sesuai kebutuhan, namun untuk SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan belum mendapat perhatian dari pemerintah maupun yayasan karena sekolah ini adalah sekolah Swasta yang dikelola oleh Yayasan bukan Sekolah Negeri.

Inilah yang menjadi pembeda yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah maupun yayasan dalam Manajemen berbasis Sekolah yaitu salah satunya adalah Kurikulum K13 difasilitasi oleh pemerintah dan yayasan agar pencapaian keberhasilan sekolah baik namun apa yang diharapkan belum sesuai dengan kenyataan dilapangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kurikulum K13 dalam manajemen berbasis sekolah pada SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan meliputi :

1. Kurikulum K13 telah diterapkan di SMA Kristen Alfa Omega Tumpaan sejak tahun 2016, namun untuk tahun ajaran 2023/2024 hanya kelas XI dan XII, sedangkan kelas X telah menerapaka kurikulum merdeka belajar. Kurikulum K13 berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa dengan pembebanan belajar pada siswa atau *student center*, guru sebagai motivator dan fasilitator.
2. Faktor pendukung penerapan Kurikulum K13, adalah kepala sekolah dan guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sekolah, pembelajaran dan siswa serta merancang pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kepala sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasarana sekolah meski belum memadai, serta adanya kerjasama dan bantuan /dukungan dari orang tua/ komite sekolah dan stakeholder.
3. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum K13 yaitu kurangnya jumlah guru, sarana dan prasarana penunjang kurikulum K13 belum memadai, serta jumlah siswa kurang. Faktor penghambat lainnya adalah pembayaran honor guru tidak tetap kurang lancar, pemerintah dan yayasan kurang perhatian, serta motivasi belajar siswa yang masih rendah disebabkan sebagian berasal dari keluarga broken home, sehingga sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian dari guru.
4. Sebagai solusi terhadap faktor penghambat adalah kepala sekolah harus berupaya agar guru yang adalah salah satu faktor penentu utama dalam menunjang keberhasilan penerapan kurikulum K13 hendaknya diikutsertakan dalam pelatihan kurikulum K13, seminar-seminar, inhouse training, lokakarya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kepala sekolah memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah, kelas serta melakukan pengadaan buku pelajaran siswa diperpustakaan secara berkala sesuai standar yang berlaku.

### **Saran**

Diharapkan kiranya ada kepedulian dari Pemerintah dan yayasan untuk SMA Kristen Alfa dan Omega Tumpaan dengan diberikannya berbagai bantuan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan, berupa penambahan guru-guru, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Kepala Sekolah agar lebih cekatan/proaktif dalam membangun kerjasama dengan orang tua, stake holder dan pemerhati pendidikan agar bisa memperoleh bantuan untuk kemajuan Sekolah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Azhar, (2005). Pokok-Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis Sebagai Pemimpin dan Eksekutif. *Montreal Executive Institute Faculty of Management*: McGill University.
- Asmani. (2012 ). Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Yogyakarta: Diva Press.
- Atmodiwirio. (2001 ). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Bellen, S, dkk. (1999). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud.
- Choliq Abdul. ( 2003 ). Pengantar Manajemen, Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Depdikbud. (2002). Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Dikmenum.
- Depdiknas.(2007). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Engkoswara.(2006). Perencanaan dan Manajemen Pendidikan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Engkoswara & AanKomariah.(2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Fattah Nanang. (2003 ). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Fattah Nanang. (2000 ). Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah, Bandung: CV Andira
- Husaini Usman. (2010). Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan; Edisi Ketiga .Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 Nomor 1, hal.118.
- Ibtisam Abu-Duhou.( 2002). *School-Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kunandar. (2009). Guru profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: PT.Raja grafindo Persada.
- Masduki Duryat. (2016). Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontestasi di Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Masyhuri dan Zainudin, M.( 2009 ).Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Apilikatif, Bandung: Refika Aditama.
- Mulyasa, E. (2009). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, N. S. ( 2008) Pengembangan kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Grasindo,
- Nurkholis. (2005). Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, Dan Aplikasi. Jakarta: PT Grasindo.
- Nurkholis. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn. ( 2006). Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Subakir Supriono dan Sapari Achmad. (2001 ). *Manajemen Berbasis Sekolah: Suatu Upaya Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan Pemberdayaan Masyarakat, Otonomi Sekolah dan Belajar yang Menyenangkan dan Efektif*, Surabaya: Penerbit SIC.
- Suhardan Dadang. ( 2010 ). *Supervisi Profesional* (Bandung: CV. Alfabeta
- Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadi. (2002). *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah; Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Syaiful Sagala. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin dan Asrul.( 2007).*Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Cita Pustaka Media
- Terry, George R. (2000). *Guide to Management*. Terj.J.Smith DFM, Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman Husaini.(2009). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.